

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 – 2024
15-17 NOVEMBER 2023**

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
NOVEMBER 2023**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 – 2024
15-17 NOVEMBER 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Maksud dan tujuan kunker ini adalah Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kesiapan dan Persiapan setiap Tahapan Pemilu dan selain itu juga persiapan tahapan Pilkada serentak 2024 yang dijalankan oleh Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, hal ini penting untuk kesuksesan Pemilu serentak 2024 sehingga dapat berjalan jujur dan adil, langsung, bebas dan rahasia serta dapat berjalan aman dan damai serta Penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya secara Profesional dan berintegritas.

Ada pun beberapa permasalahan menjadi objek pengawasan DPR sesuai tahapan Pemilu serentak 2024 saat ini diantaranya:

- a. Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- b. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Kabupaten Purwakarta, apakah sudah bersih dari Pemilih Ganda, Pemilih yang tidak punya KTP elektronik, Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri, Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum dan Pemilih yang sudah berpindah domisili
- c. Terkait dengan Kebijakan dan terobosan Pemkab Purwakarta dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
- d. Terkait dengan Verifikasi Caleg yang dijalankan oleh KPU Purwakarta pada masa Pencermatan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Apakah ada Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan sebelum Penetapan DCT serta proses pengantian Caleg tersebut, apakah ada permasalahan yang terjadi.
- e. Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI dan terkait Pengadaan Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan

perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.

- f. Persiapan dan kesiapan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Meninggal Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 Hari, Bagaimana persiapan Pelaksanaan dan pembagian Jadwal Kampanye Calon Legislatif DPR, DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Juga terkait dengan Himbauan Bawaslu tanggal 4 sampai dengan 27 November 2023 Dilarang Kampanye Bagi Peserta Pemilu dan Caleg untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal tahapan kampanye dimulai,
- g. Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Apakah Pemda sudah mengalokasikan Anggarannya masuk dalam APBD. Apakah sudah ada penanda tangan NPHD antara KPU, Bawaslu Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Purwakarta.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Saan Mustopa, M.Si. beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F- Nasdem
2.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Wakil Ketua Komisi II / F- PKB
3.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-186	Paryono, S.H, M.H	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
6.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F-Gerindra

7.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-Gerindra
8.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Anggota/ F-Gerindra
9.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-Gerindra
10.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-Nasdem
11.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
12.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
14.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN
15.	A-490	Khairul Muhtar, SE., M.M	Anggota/ F-PAN
16.	----	Fahmi Asy'ari	Kasubag Rapat Set. Komisi II
17.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
18.	----	Endang Setia Purnama	Sekretariat Komisi II
19.	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
20.	----	Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
21.	----	Abrar Amir	Tenaga Ahli Komisi II
22.	----	Azka Restu Afdillah	Media Cetak & Media Sosial
23.	----	Robi Kuswara	Kendaraan

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial DPR RI, dan 1 (satu) dari bagian kendaraan DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 15-17 November 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Purwakarta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Penjabat Bupati Purwakarta

Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.03 juta jiwa. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat peningkatan kinerja makro. Berkenaan dengan agenda hari ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendukung pesta demokrasi nasional sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemerintah daerah memiliki tugas memberikan bantuan dan fasilitas melalui kerjasama penyediaan data kependudukan, penugasan personil pada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), penyediaan sekretariat PPK, distribusi logistik, penugasan, linmas, serta menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Sejauh ini tahapan pemilu di Kabupaten Purwakarta berjalan sebagaimana direncanakan, harapannya 90 hari ke depan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yakni adanya kepastian umum, tertib, terbuka dan efisien. Apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024.

B. Sambutan Ketua Tim Kunjungan (Saan Mustopa)

Kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Komisi II DPR RI ingin mendapatkan informasi dan penjelasan terkait persiapan dan kesiapan menghadapi pemilu serentak pada 14 Februari 2024 di Kabupaten Purwakarta yang tinggal 90 hari lagi. Ke depan akan ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan DPD RI. Pada bulan November 2024 juga akan ada pilkada serentak nasional.

Tahapan-tahapan pemilu ada yang sudah berlangsung, sekarang masuk pada tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan legislative sudah bisa diakses oleh publik. Tahapan Pemilihan presiden sudah melakukan penentuan nomor urut calon presiden dan wakil presiden yang terdapat 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu: 1. Anies-Muhaimin, 2. Prabowo-Gibran, 3. Ganjar Mahfud.

Beberapa hal yang ingin Komisi II DPR RI ketahui di Kabupaten Purwakarta antara lain:

- a. Kita akan memasuki tahapan krusial yaitu kampanye di tanggal 28 November-10 Desember 2023. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan Perppu Pemilu ditetapkan 15 hari sebelum kampanye dan calon legislatif maju 25 hari sebelum kampanye. Hal ini menyebabkan adanya interval waktu untuk calon legislatif dan pasangan calon presiden dan

calon wakil presiden yang sangat multitafsir. Terdapat interval waktu yang bukan masa kampanye tapi seperti kampanye karena sudah ada pemasangan atribut kampanye dan baliho. Sementara itu, tidak mungkin para peserta pemilu untuk diam saja selama interval waktu tersebut tanpa melakukan apa-apa. Perlu ada kepastian untuk para peserta pemilu agar muncul rasa keadilan. Jika tidak ada keadilan, hal itu akan menjadi sumber permasalahan dalam pemilu. Sampai tanggal 28 November 2023, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta pemilu. Jika atribut kampanye dan baliho mau ditertibkan maka semua ditertibkan jangan salah satu peserta pemilu saja.

- b. Logistik pemilu dimajukan 15 dan 25 hari untuk memastikan ketersediaan logistik karena masa kampanye yang pendek hanya 75 hari. Kalau penetapan pasangan calon dilakukan 3 hari sebelum kampanye khawatir distribusi logistik tidak maksimal. Kalau pemilu sebelumnya masa kampanye panjang, sehingga penyelenggara pemilu memiliki cukup waktu untuk melakukan distribusi logistik pemilu. Pemilihan legislatif ada 84 kertas suara yang berbeda, untuk pemilihan provinsi ada 18 kertas yang berbeda. Banyak desain kertas suara yang berbeda. Hal ini membutuhkan kehati-hatian.
- c. Berapa jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Purwakarta, adakah pemilih tambahan, karena ada pula daerah industri. Perlu ada data tambahan yang berimplikasi pada logistik pemilu.
- d. Netralitas ASN yang sangat penting, apalagi pejabat daerah sekarang diduga tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu. Ada keraguan terhadap pejabat daerah terkait netralitas ASN. Sampai presiden pun menegaskan seluruh aparat terkait harus menjaga netralitas ASN.
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kabupaten Purwakarta sudah berapa persen untuk pilkada, termasuk untuk pengamanan pilkada.

C. Pemaparan Pejabat Bupati Purwakarta

- c. Prakiraan jumlah wajib KTP-el dari jumlah penduduk sebanyak 1.029.561 jiwa di Kabupaten Purwakarta per tanggal 14 Februari 2024 yaitu:
 - Jumlah wajib KTP-el 735.707 jiwa yang terdiri dari 369.645 laki-laki dan 366.062 perempuan.
 - Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el 729.296 jiwa (99.13%).
 - Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el 8.411 jiwa (0.87%).
 - Penduduk yang belum melakukan cetak KTP-el 1.166 jiwa (0.16%).
- d. Inovasi layanan administrasi kependudukan Kabupaten Purwakarta dalam mendukung suksesnya pemilu serentak 2024 antara lain:
 - Perekaman KTP-el bagi warga binaan pemasyarakatan.
 - Perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di SMA/SMK/MA/SLB.

- Pelaporan peristiwa kematian di tingkat desa/kel dan rumah sakit berdasarkan Perbup No. 100 Tahun 2023.
 - Perekaman SIJEMPOL bagi penduduk difabel, lansia dan sakit langsung ke rumah warga.
- e. Dukungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 antara lain:
- Fasilitasi sarana dan prasarana sekretariat badan adhoc (PPK : 85, PPS : 576, KPPS : 18.851).
 - Penugasan kepada pegawai pemda menjadi penyelenggara pemilu dan sekretariat badan adhoc.
 - Sosialisasi pemilu serentak 2024 (media sosial dan tempat pengumuman).
 - Dukungan pendanaan pemilihan, yaitu:
 - ⇒ KPU sebesar Rp40.000.000.000,- pencairan 2023 (40%) sebesar Rp16.000.000.000,- dan pencairan 2024 (60%) sebesar Rp24.000.000.000,-
 - ⇒ Bawaslu sebesar Rp10.500.000.000,- pencairan 2023 (40%) sebesar Rp4.200.000.000,- dan pencairan 2024 (60%) sebesar Rp6.300.000.000,-
- f. Upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menjaga netralitas ASN yaitu:
- Menerbitkan surat edaran netralitas untuk ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.
 - Menandatangani pakta integritas netralitas ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.
 - Memberikan sanksi setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu).
- g. Gambaran umum kerawanan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu:
- Bidang Ideologi : radikalisme, paham/aliran bertentangan dengan Pancasila, degradasi nilai Pancasila.
 - Bidang Politik : Pemilu dan Pilkada 2024, *black campaign*, hoaks dan ujaran kebencian.
 - Bidang Sosbud : pendirian rumah ibadah, aliran kepercayaan, hoaks dan ujaran kebencian.
 - Bidang Keamanan: ancaman ekstrimisme dan terorisme, tindakan kriminal, keamanan siber, bentrokan antar kelompok.
 - Bidang Ekonomi : instabilitas ekonomi, kenaikan BBM dan harga bahan pokok, penetapan upah, PHK pasca Pandemi Covid-19.

D. Pemaparan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta

- a. Perencanaan program anggaran kebutuhan KPU Kabupaten Purwakarta dalam setiap tahapan Pemilu serentak 2024 telah dianggarkan oleh KPU RI secara Top down disesuaikan kebutuhan serta Jadwal dan Tahapan di Kabupaten / Kota. Dalam Revisi terakhir Total Pagu yang dianggarkan oleh KPU RI untuk KPU Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 39.988.707.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 38,095,626,000
 - Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,893,081,000
- b. Perbandingan DPT pemilu 2024 dengan DPT pemilu 2019



- c. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) periode Oktober 2023 yaitu DPTb masuk 918 orang dan DPTb keluar 677 orang.
- d. Jumlah TPS sebanyak 2.693 unit dan TPS khusus sebanyak 2 unit yang berlokasi di lapas.
- e. Dapil dan alokasi kursi pada pemilu tahun 2024



f. Perlengkapan pemungutan suara



g. Sosialisasi, penguatan, pelatihan atau bimbingan teknis kepada Caleg dan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Purwakarta

- Sosialisasi, penguatan, pelatihan, dan bimbingan teknis sering dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang melibatkan partai politik di setiap tahapan Pemilu.
- Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik mulai dari bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sipol, rapat koordinasi persiapan verifikasi keanggotaan, rapat koordinasi perbaikan keanggotaan partai politik, rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual, dan rekapitulasi hasil verifikasi.
- Pada tahapan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan uji publik dengan mengundang partai politik dan mempertimbangkan setiap masukan partai politik untuk penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursinya.
- Setelah ditetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi, KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi kepada partai politik.
- Pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, KPU Kabupaten Purwakarta melakukan kegiatan penguatan partai politik seperti sosialisasi pencalonan dengan mengunjungi setiap kantor partai politik, bimbingan teknis penggunaan aplikasi Silon, rapat koordinasi persiapan pengajuan bakal calon, rapat koordinasi pengajuan

perbaikan, rapat koordinasi pencermatan DCS dan , rapat koordinasi finalisasi surat suara dan penetapan DCT.

- h. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat antara lain:
- Pada Tahun 2022 KPU Kabupaten Purwakarta mengadakan kelas demokrasi yang dilaksanakan sampai dengan 6 kelas. Adapun peserta kegiatan dari berbagai macam unsur seperti pelajar, mahasiswa, wiraswasta, guru, dll.
 - KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan sosialisasi pemilu bagi perempuan dan kelompok rentan disabilitas.
 - KPU Kabupaten Purwakarta membuat agenda bersama dengan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk melakukan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah, pondok pesantren. sosialisasi bagi masyarakat umum dilakukan dengan memanfaatkan momentum perkumpulan RT, perkumpulan RW, kegiatan peringatan hari besar nasional dan kegiatan peringatan hari besar islam.
 - KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan nonton bareng film pendidikan pemilih yang berjudul “Kejarlah Janji” pada tanggal 22 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3. Pada tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan nonton bareng digelar dengan mahasiswa dan pemuda di kampus STIE Wikara.
 - KPU Kabupaten Purwakarta bersama dengan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, melakukan sosialisasi pemilu tahun 2024 dengan membuat konten-konten pemilu tahun 2024.
- i. Dukungan infrastruktur dalam hal ini gudang penyimpanan logistik pemilu, satuan kerja KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan perikatan sewa dengan pihak ke 3 (tiga), dalam pelaksanaan persiapannya, dilakukan penyediaan dukungan perlengkapan lainnya seperti penyediaan alat bantalan palet, fumigasi untuk pencegahan anti rayap, pengemasan barang logistik menggunakan terpal, penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), permasalahan yang dihadapi sulitnya mendapatkan gudang yang proporsional didalam cakupan/jarak wilayah terdekat dengan kantor KPU Kabupaten Purwakarta, terhambatnya proses pemenuhan sarana dan prasarana dukungan lainnya dikarenakan anggaran dalam tahap revisi DJA.
- j. Kondisi pegawai KPU Kabupaten Purwakarta: Jumlah Pegawai 24 orang (ASN 12 orang, PPNPN 12 orang). Perlu penambahan SDM sedikitnya 10 orang lagi karena beban kerja yang berat dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Tidak ada penambahan ASN oleh Pemerintah

Daerah, karena berdasarkan regulasi bahwa tidak ada lagi PNS Pemda yang berstatus DPK (Diperbantukan) di KPU.

- k. KPU Kabupaten Purwakarta secara intens selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi harmonis dengan pemerintah daerah, Kepolisian Resort Purwakarta, Kodim 0916 Purwakarta serta seluruh stakeholder terkait sehingga dapat secara sinergis membantu kelancaran tahapan pemilu serentak 2024.
- l. KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan tahapan kampanye berdasarkan pada PKPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, PKPU No.20 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Saat ini KPU Kabupaten Purwakarta sedang intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kebijakan titik lokasi penempatan bahan kampanye. Terkait jadwal, program dan larangan kampanye KPU Kabupaten Purwakarta menggunakan peraturan KPU seperti tersebut di atas sebagai pedoman pelaksanaan. KPU Kabupaten Purwakarta tentu saja akan melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama partai politik dan stakeholder terkait sebelum tahapan kampanye dimulai yaitu tanggal 28 November 2023. Sebagai bahan evaluasi kampanye pada Pemilu tahun 2019 adalah masih banyak.
- m. Terkait rencana dimajukannya jadwal pilkada serentak 2024 ke bulan September 2024, KPU Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan komando secara berjenjang dengan penuh tanggungjawab.
- n. Konsekuensi dan permasalahan teknis maupun regulasi bagi KPU Kabupaten Purwakarta termasuk permasalahan badan ad hoc pemilu, jika ada rencana percepatan pemajuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 yaitu beban kerja penyelenggara termasuk badan ad hoc akan lebih berat dan tidak seimbang dengan jumlah personil penyelenggara, karena tahapan pilkada yang beririsan dengan tahapan Pemilu serentak akan menimbulkan penumpukan beban kerja. Jika beban kerja tidak seimbang dengan jumlah personil dan waktu kerja, dikhawatirkan terjadi kembali kejadian pada pemilu 2019 di mana banyak penyelenggara yang gugur dalam tugas.
- o. Alokasi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk penyelenggaraan pilkada 2024
KPU Kabupaten Purwakarta telah membuat perencanaan anggaran belanja sebesar yang telah diajukan kepada Pemerintah yaitu Rp 40.000.000.000,-

(empat puluh milyar rupiah) dimana pencairan dana hibah senilai 40% dilaksanakan sekaligus sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) di tahun 2023 dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani NPHD, sedangkan pencairan dana hibah 60% dilaksanakan sekaligus sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan NPHD sudah dilakukan serentak di Provinsi Jawa Barat disaksikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat dan dihadiri oleh Bupati/Walikota serta Pj Bupati/Walikota se Jawa Barat serta Ketua KPU Se- Jawa Barat bertempat di Aula Gedung Sate Bandung pada hari Kamis, 9 November 2023.

E. Pemaparan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta

- a. Pengawasan pendaftaran dan penetapan calon DPRD Kabupaten Purwakarta
 - Jumlah calon yang BMS sebelum DCS (terdapat 830 bakal calon legislatif (bacaleg) yang masih berstatus BMS.
 - Jumlah DCS (terdapat 732 bacaleg yang ditetapkan KPU pada DCS.
 - Keterwakilan perempuan 30% (semua partai memenuhi 30% keterwakilan perempuan).
 - Jumlah DCT (terdapat 732 caleg dari 18 partai politik yang ditetapkan KPU pada penetapan DCT.
- b. Pengawasan daftar pemilih
 - Daftar Pemilih Sementara (DPS) 737.824 orang.
 - Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 734.904 orang.
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) 733.927 orang.
 - Non KTP-el 16.590 orang.
- c. Pengawasan TPS (terdapat 2.693 TPS dari 17 kecamatan dan terdapat 2 TPS khusus yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan (lapas).
- d. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Purwakarta menempati posisi ke-24 se-Jawa Barat dengan nilai 18.65%.
- e. Bawaslu Kabupaten Purwakarta masih berstatus non satuan kerja, hal itu terjadi karena masih minimnya jumlah pegawai ASN. Pegawai Bawaslu Kabupaten Purwakarta terdiri dari 3 ASN (2 PNS dan 1 PPPK) serta 18 PPNPS).
- f. Sinergitas lembaga antara Bawaslu dan Forkopimda Kabupaten Purwakarta sangat baik.

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, KPU, Bawaslu, Kejaksaan, TNI, dan Polri di Kabupaten Purwakarta atas koordinasi dan sinergitas yang telah dibina dengan baik guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
2. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, terbuka, jujur dan adil, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan aparat penegak hukum berkomitmen menjaga netralitas ASN pada seluruh tahapan pemilu serentak 2024.
3. Mengingat maraknya pemasangan atribut dan baliho peserta pemilu di berbagai tempat menuju masa kampanye yang baru akan dimulai pada 28 November 2023, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum guna mewujudkan situasi kondusif, tertib dan aman.
4. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta memastikan pemilih pemula segera mendapatkan KTP-el agar dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

IV. PENUTUP

Seluruh temuan dan masukan yang didapatkan dari rapat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, KPU dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, serta stakeholder lainnya di Kabupaten Purwakarta akan disampaikan kepada mitra kerja Komisi II DPR RI terkait dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat yang akan datang. Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15-17 November 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Saan Mustopa, M.Si.